

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG DI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PONOROGO
PEMETAAN CAKUPAN PENGGUNA KB AKTIF, PENGGUNA KB AKTIF
BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI dan PREVALENSI *UNMET NEED*
DI KABUPATEN PONOROGO: Data Per Bulan Desember 2021
(Aplikasi Sistem Informasi Geografis menggunakan Software Quantum GIS)**



Oleh:

Bella Dwi Saputri NIM. 101811133078

**DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatISTIKA dan KEPENDUDUKAN,
PROMOSI KESEHATAN dan ILMU PERILAKU
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

LAPORAN KEGIATAN MAGANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PONOROGO

Disusun Oleh:

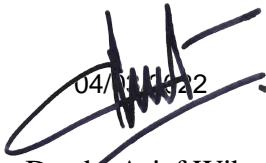
Bella Dwi Saputri

NIM. 101811133078

Telah Disahkan Dan Diterima Dengan Baik Oleh

Pembimbing Departemen,

Tanggal, 4 Maret 2022



Dr. dr. Arief Wibowo, MS.

NIP. 195903101986011001

Pembimbing Instansi,

Tanggal, 2 Maret 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan



Edy Darwanto, ST

NIP. 197403192003121005

Tanggal, 4 April 2022

Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika dan
Kependudukan, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku



Dr. Farani Syahrul, SKM., M.Kes

NIP. 196902101994032002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kegiatan magang mandiri yang dilaksanakan selama 1 bulan yaitu tanggal 17 Januari 2022-25 Februari 2022 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Saya sadar keberhasilan dan kelancaran dalam kegiatan ini tidak lepas dari dukungan pihak-pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu kami ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes. selaku koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat
2. Ibu Dr. Santi Martini, dr. M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang telah memberikan izin dan dukungan kepada kami dalam penyelesaian karya tulis ini.
3. Bapak Dr. dr. Arief Wibowo, MS. selaku dosen pembimbing yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan pengarahan
4. Bapak Edy Darwanto selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan juga selaku Dosen Pembimbing Instansi yang telah menerima saya dengan baik dan membantu pelaksanaan magang sehingga kegiatan magang mandiri ini dapat terealisasi dengan baik
5. Seluruh staf di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah membantu dan memberikan pengalaman mengenai dunia kerja selama kegiatan magang berlangsung

Meskipun saya telah berusaha seoptimal mungkin dalam mengikuti dan menyelesaikan kegiatan ini, saya berharap mendapat kritik dan saran apabila dalam laporan kegiatan ini terdapat beberapa hal yang belum maksimal.

Ponorogo, 1 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	4
2.2 Keluarga Berencana.....	6
2.3 Metode Kontrasepsi.....	8
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG	9
3.1 Tempat Magang.....	9
3.2 Waktu Magang.....	9
3.3 Metode Pelaksanaan Magang.....	10
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
3.5 Output Magang.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang.....	12
4.2 Alur Perolehan Data.....	18
4.3 Studi Kasus.....	23
BAB V PENUTUP	29
5.1 Kesimpulan.....	29
5.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Data Vektor dan Data Raster.....	5
Tabel 2.2 Pemilihan Alat Kontrasepsi berdasarkan Tujuan Pemakaian.....	8
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Magang.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerapan ilmu Biostatistika dan Kependudukan di dunia kerja adalah mengenai pembuatan peta tematik. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami masalah kependudukan yang diantaranya adalah jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat, persebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk rendah, dan komposisi penduduk yang sebagian besar berada pada usia reproduktif. Permasalahan mengenai pertumbuhan penduduk bisa diatasi dengan adanya pelaksanaan program KB. Dengan terlaksananya program KB secara baik dan merata ke seluruh wilayah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia bisa terkontrol dan berdampak pada kualitas penduduk yang meningkat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mengurus mengenai masalah jumlah penduduk dan program Keluarga Berencana termasuk didalamnya mengenai data tentang kepesertaan KB yang ada di Kabupaten Ponorogo. Menurut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, Kepesertaan KB dibagi menjadi 2 yaitu terdapat Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru (BKKBN, 2017). Peserta KB aktif merupakan akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya. Sedangkan peserta KB baru merupakan peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca persalinan pasca keguguran. Di dalam pelaksanaan KB sendiri, juga terdapat istilah *unmet need*. *Unmet Need* merupakan PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

Menurut Peraturan Kepala BKKBN Nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, jenis metode kontrasepsi dibagi menurut jangka waktu pemakaian dan menurut komposisi (BKKBN, 2017). Berdasarkan jangka waktu pemakaian, metode kontrasepsi dibagi menjadi metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. Sedangkan berdasarkan komposisinya, metode kontrasepsi dibagi menjadi metode kontrasepsi hormonal dan metode kontrasepsi non hormonal. Cakupan penggunaan setiap metode kontrasepsi pada setiap wilayah di kabupaten ponorogo berbeda-beda. Untuk melihat dan mengidentifikasi cakupan KB, jenis metode kontrasepsi yang digunakan, serta kejadian *unmet need* pada suatu wilayah bisa dilakukan dengan melakukan pembuatan peta tematik.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Memperoleh pengalaman di dunia kerja serta memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan di bidang Biostatistika dan Kependudukan khususnya

mengenai pembuatan peta tematik yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mempelajari gambaran umum tentang profil, struktur organisasi, susunan organisasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui alur perolehan data sekunder
3. Menganalisis peta sebaran cakupan pengguna KB aktif setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo
4. Menganalisis peta sebaran kepesertaan KB berdasarkan jenis metode kontrasepsi yang digunakan
5. Menganalisis peta sebaran prevalensi *unmet need* pada setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman, keterampilan, penyesuaian sikap, dan penghayatan pengetahuan di dunia kerja.
2. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat.
3. Sebagai sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya pada bidang Biostatistika dan Kependudukan.
4. Mempelajari kondisi di lapangan, permasalahan yang ada, serta mampu mengidentifikasi prosedur kerja di tempat magang.

1.3.2 Bagi Instansi

1. Laporan magang ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pengembangan dan penerapan program yang lebih baik lagi serta bisa dijadikan bahan evaluasi mengenai program yang sudah ada
2. Laporan magang ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas program yang sedang berjalan baru untuk pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.
3. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara instansi tempat magang dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

1.3.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pembelajaran.
2. Mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

3. Sebagai data pendahuluan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan magang selanjutnya serta dapat meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill mahasiswa yang dapat meningkatkan kualitas lulusannya.
4. Dapat digunakan sebagai tambahan bacaan atau referensi ruang baca Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tentang pengalaman belajar dan bekerja di lapangan, khususnya mengenai pengetahuan dan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung.
5. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan instansi tempat magang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membuat peta secara komputasi dengan tahapan input data (pengumpulan dan penataan), proses data (pengolahan dan analisis) serta output data (penyajian) (Sugaadi et al., 2009). Sistem Informasi Geografis merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran situasi ruang muka bumi atau informasi tentang ruang muka bumi yang diperlukan untuk dapat menjawab atau menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam ruang muka bumi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan rangkaian kegiatan input dan proses data sehingga bisa diperoleh output berupa informasi spasial yang bisa digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk investigasi tanah, manajemen sumber daya, manajemen asset, kajian terkait dampak lingkungan, perencanaan wilayah, kartografi dan jalur kedaruratan bencana (Sugaadi et al., 2009).

Sistem Informasi Geografis terdiri atas 5 komponen dasar yaitu data, perangkat lunak, perangkat keras, sumber daya manusia, dan pengguna SIG. Data merupakan komponen utama yang akan diproses dalam SIG. Perangkat lunak merupakan komponen untuk mengintegrasikan berbagai macam data masukan yang akan diproses. Perangkat keras merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data SIG seperti komputer, digitizer, scanner, plotter, monitor dan printer. Sumber daya manusia dan pengguna SIG merupakan pengguna SIG mulai dari proses penginputan data hingga proses penyajian hasil analisis SIG (*Sistem Informasi Geografi*, 2012).

1. Data

Data di dalam SIG terbagi menjadi 2 yaitu data geografis (spasial dimensi) seperti informasi mengenai lintang dan bujur, informasi mengenai datum dan proyeksi dan data atribut (non spasial dimensi) seperti misalnya letak sumber air, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam 2 format yaitu sebagai berikut:

a. Format Vektor

Format vektor akan merepresentasikan bumi kedalam suatu mosaik dari titik, nodes, garis, dan poligon. Keuntungan utama data spasial dalam format vektor ini adalah ketepatan dalam merepresentasikan titik, batasan dan garis. Selain itu data dalam format vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file serta presisi dalam lokasi. Kelemahan data dalam format vektor adalah tidak mampu dalam mengakomodasi perubahan gradual dan sangat sulit dilakukan komputasi matematik.

b. Format Raster

Format raster akan merepresentasikan bumi kedalam struktur grid yang disebut pixel. resolusi pixel dalam format raster ini menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi, semakin kecil ukuran bumi yang direpresentasikan maka akan semakin tinggi pula resolusinya. Keuntungan data dalam format raster

adalah sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual dan dapat dilakukan komputasi secara matematis. Kelemahan data dalam format raster adalah membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya yang rendah.

Berikut terdapat perbandingan antara data dalam format vektor dan data dalam format raster:

Parameter	Vektor	Raster
Akurasi	Akurat dan lebih presis	Snagat bergantung dengan ukuran grid/sel
Atribut	Relasi langsung dengan database	Relasi dengan database secara tidak langsung
Kompleksitas	Tinggi, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks	Mudal dalam proses pengorganisasian
Output	Kualitas tinggi akan bergantung pada printer dan kartografi	Kualitas tinggi bergantung pada printer
Analisis	analisis secara spasial dan terintegrasi	analisis bergantung pada algoritma
Aplikasi dalam Remote Sensing	Tidak langsung dan memerlukan konversi	Langsung
Simulasi	Kompleks dan sulit	Mudah
Inut	Digitasi dan memerlukan konversi dari scanner	Sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dari hasil konversi dengan menggunakan scan
Volume	Bergantung pada kepadatan dan jumlah verteks	Bergantung pada ukuran grid/sel
Resolusi	Bermacam-macam	Tetap

Tabel 2.1 Perbandingan Data Vektor dan Data Raster

2. Perangkat Lunak

Elemen yang terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG adalah:

- a. *Tool* untuk melakukan input dan transformasi data geografis
- b. *Tool* yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi
- c. *Graphical User Interface* (GUI) untuk memudahkan akses pada *tool* geografi

Perangkat Lunak dalam SIG harus mampu untuk melakukan pengolahan data grafis, pengolahan basis data, analisis dan penyajian data, operasi kartografi, aplikasi khusus dan pengembangan.

- a. Pengolahan data grafis
Pengolahan data grafis digunakan untuk mengkonversi data dari satu format ke format lain yang dapat digunakan dalam SIG. Komponen pengolahan data grafis SIG meliputi pemasukan data grafis, pemasukan data atribut, penyuntingan data grafis, dan penyajian data
 - b. Pengolahan basis data
Pengolahan basis data digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan data dari basis data
 - c. Analisis dan penyajian data
Analisis dan penyajian data meliputi pembuatan overlay, utilisasi analisis peta, integrasi data spasial, proses transformasi koordinat, dan lain sebagainya
 - d. Operasi kartografi
Operasi Kartografis meliputi 3 kelompok yaitu terdapat Edgematching, Penggabungan unsur, dan Ekstrak Unsur. Edgematching merupakan pembuatan data yang berasal dari lembar peta yang berbeda serta dilakukan pencocokan terlebih dahulu. Penggabungan unsur merupakan proses pemutakhiran data. Ekstrak unsur berkaitan dengan penyimpanan file yang telah dibuat.
 - e. Aplikasi khusus dan pengembangan
3. Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG terbagi menjadi 3 yaitu input, manajemen dan analisis serta output
 4. Sumber daya manusia
Orang yang terlibat dalam SIG diantaranya orang yang mendapatkan pelatihan yang baik mengenai SIG, operator, Supplier SIG, dan lain sebagainya

2.2 Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga demi tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Di dalam program KB, setiap keluarga dianjurkan untuk mempunyai dua anak saja atau bisa disebut sebagai keluarga kecil. Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup setiap anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera (Matahari et al., 2018). Berikut adalah 2 tujuan pokok Program KB:

1. Menurunkan angka kelahiran agar penambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi
2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera

Sasaran program KB terbagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung (Matahari et al., 2018). Sasaran langsung dalam program KB adalah Pasangan Usia Subur yang

bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsung dalam program KB adalah pelaksana dan pengelola KB yang berperan sebagai pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Berikut adalah ruang lingkup Program KB:

1. Komunikasi informasi dan edukasi
2. Konseling
3. Pelayanan infertilitas
4. Pendidikan seks
5. Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan
6. Konsultasi genetik

Berikut adalah macam-macam akseptor KB:

1. Akseptor KB Aktif yaitu akseptor yang saat ini sedang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau bahkan mengakhiri kesuburan
2. Akseptor KB Aktif Kembali yaitu pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih dan tidak diselingi kehamilan lalu kembali menggunakan alat kontrasepsi baik dengan alat yang sama seperti sebelumnya atau berbeda.
3. Akseptor KB Baru adalah akseptor KB yang baru pertama kali menggunakan cara atau alat kontrasepsi atau akseptor KB yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan atau setelah mengalami abortus
4. Akseptor KB Dini yaitu para wanita yang menerima salah satu cara atau alat kontrasepsi dalam waktu 2 minggu setelah melahirkan atau setelah mengalami abortus
5. Akseptor KB Langsung yaitu wanita yang menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dalam waktu 40 hari setelah melahirkan atau setelah mengalami abortus
6. Akseptor KB Dropout yaitu akseptor KB yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan

Berikut adalah macam akseptor KB menurut sarasannya:

1. Fase Menunda Kehamilan
Fase menunda kehamilan sebaiknya dilakukan oleh pasangan usia subur yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Alat Kontrasepsi yang cocok untuk digunakan adalah alat kontrasepsi dengan pulihnya kesuburan yang tinggi artinya dapat menjamin kembalinya kesuburan wanita.
2. Fase Mengatur atau Menjarangkan Kehamilan
Periode wanita ketika berada di usia 20-30 tahun merupakan periode usia untuk mengatur atau menjarangkan kehamilan karena pada rentang usia ini merupakan rentang paling baik untuk mengalami masa kehamilan hingga melahirkan. Kontrasepsi yang diperlukan adalah kontrasepsi dengan efektifitas tinggi dan reversibilitas tinggi. Alat kontrasepsi dapat digunakan 3-4 tahun sesuai dengan jarak kelahiran yang direncanakan oleh setiap pasangan suami istri.
3. Fase Mengakhiri Kesuburan
Apabila suatu keluarga telah memiliki 2 anak dan istri sudah memasuki usia lebih dari 30 tahun akan lebih baik apabila tidak mengalami kehamilan lagi. Keluarga dengan

kondisi seperti ini dapat memilih alat kontrasepsi yang mempunyai efektivitas tinggi, karena apabila terjadi kegagalan akan berakibat pada kehamilan dengan risiko tinggi bagi ibu dan anak.

Berikut adalah pemilihan alat kontrasepsi berdasarkan tujuan penggunaannya:

Urutan Prioritas	Fase Menunda Kehamilan	Fase Menjarangkan Kehamilan	Fase Mengakhiri Kesuburan
1	Pil	AKDR	Vasektomi/Tubektomi
2	AKDR	Suntik	AKDR
3	Kondom	Pil	Implan
4	Implan	Implan	Suntik
5	Suntik	Kondom	Kondom
6			Pil

Tabel 2.2 Pemilihan Alat Kontrasepsi berdasarkan Tujuan Pemakaian

2.3 Metode Kontrasepsi

Metode kontrasepsi terbagi menjadi 2 kelompok yaitu metode kontrasepsi berdasarkan jangka waktu pemakaian dan metode kontrasepsi berdasarkan komposisi.

1. Metode kontrasepsi berdasarkan jangka waktu pemakaian
 - a. Metode kontrasepsi jangka panjang
Kontrasepsi mantap (tubektomi atau MOW dan vasektomi atau MOP), AKDR (IUD), dan AKBK (Implan)
 - b. Metode kontrasepsi jangka pendek
Suntik, pil, kondom
2. Metode Kontrasepsi berdasarkan komposisi
 - a. Metode kontrasepsi hormonal
progestin, kombinasi progestin dan esteregon
 - b. Metode kontrasepsi non hormonal
kontrasepsi mantap (tubektomi dan vasektomi), AKDR, Kondom, Metode Amenorea Laktasi

BAB III**METODE KEGIATAN MAGANG****3.1 Tempat Magang**

Tempat : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ponorogo
 Alamat : Gedung terpadu lantai 5, Jalan Basuki Rahmat Ponorogo
 Telp : 0352481874
 Email : dppkb@ponorogo.go.id

3.2 Waktu Magang

Pelaksanaan kegiatan magang berlangsung mulai Senin, 17 Januari 2022 sampai 25 Februari 2022. Adapun jadwal kegiatan magang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

No	Kegiatan	Waktu													
		Desember				Januari				Februari				Maret	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
1	Persiapan, penyusunan proposal magang, dan konsultasi ke dosen pembimbing magang														
2	Pengajuan proposal dan perizinan magang														
3	Perizinan magang ke Bakesbang Kabupaten Ponorogo dan perizinan ke instansi magang														
4	Pelaksanaan Magang 1. Perkenalan														

	<p>dan orientasi di tempat magang.</p> <p>2. Mempelajari struktur organisasi, alur kerja, dan susunan organisasi.</p> <p>3. Melakukan pengumpulan data sekunder</p>																		
5	Penyusunan laporan magang																		
6	Seminar Laporan Magang																		

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Magang

3.3 Metode Pelaksanaan Magang

Metode pelaksanaan magang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi dalam mengikuti kegiatan di tempat magang dan mempelajari data sekunder. Peserta magang mempelajari data sekunder yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo untuk menunjang penyusunan laporan hasil magang.

2. Observasi

Mahasiswa magang melaksanakan kegiatan observasi langsung tentang prosedur pelaksanaan pengolahan data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.

3. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi maupun teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan mencoba untuk menerapkan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau tempat magang.

4. *Indepth Interview*

Mahasiswa magang melakukan wawancara terhadap staf dan pembimbing instansi pada waktu pelaksanaan kegiatan magang untuk mencari keterangan dan informasi yang akan digunakan sebagai data primer untuk penyusunan laporan magang.

5. Ceramah

Ceramah merupakan pengarahan dan penjelasan dari pembimbing maupun dari staf instansi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara mandiri yaitu dengan mengakses situs <http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/>. Situs ini merupakan hasil dari Laporan Statistika Rutin yang dikelola oleh BKKBN. Setelah itu mahasiswa melakukan pencarian dan mendownload sumber data yang dibutuhkan untuk dikaji lebih lanjut sebagai sumber data untuk laporan magang.

3.5 Output Magang

Kegiatan magang dilakukan secara offline pada 17 Januari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022. Adapun output kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan instansi dan kondisi lapangan.
Pengenalan instansi dilakukan oleh satu staff Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa pengenalan terkait visi misi, tugas pokok, dan struktur organisasi. Pengenalan dilakukan di awal kegiatan magang dengan metode ceramah. Pengenalan dan penjelasan terkait data dan alur manajemen data yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana utamanya di bagian Pengendalian penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dilakukan beberapa kali selama magang berlangsung melalui metode indepth interview
2. Partisipasi Aktif
Partisipasi peserta magang dilakukan sesuai dengan kebutuhan staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya bagian pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Tugas dan kegiatan yang dilakukan diantaranya memonitoring input data setiap kecamatan, merekap data, menghitung cakupan sutau program dan lain sebagainya.
3. Diskusi, Wawancara, dan Pengumpulan data.
Mahasiswa melakukan diskusi, wawancara, dan pengumpulan data untuk mencari keterangan dan informasi yang mampu digunakan untuk isi laporan magang. Informasi yang didapatkan selama magang dapat digunakan untuk menambah wawasan yang tidak didapatkan selama proses perkuliahan. Wawancara dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada salah satu staf bagian pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
4. Studi Literatur.
Studi literatur yang dilakukan yaitu mengakses internet untuk mendapatkan teori dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan mengatur tentang pelaksanaan program KB
5. Penulisan laporan magang
Penulisan laporan magang dilakukan mahasiswa sesuai topik laporan yang diangkat. Penulisan laporan ini juga dilakukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta sebagai hasil pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan selama 6 minggu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang

4.1.1 Visi, Misi, Fungsi, Kewenangan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kontribusi untuk mendukung tercapainya misi Bupati Ponorogo yaitu pada misi kedua. Misi kedua Bupati Ponorogo adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya dengan sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam mencapai misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB
2. Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas
4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
5. Pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan di bidang:

1. Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten
3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal
4. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di kabupaten

6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Keluarga Berencana
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan urusan penduduk dan KB adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari beberapa program yang ada akan dijabarkan menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut:

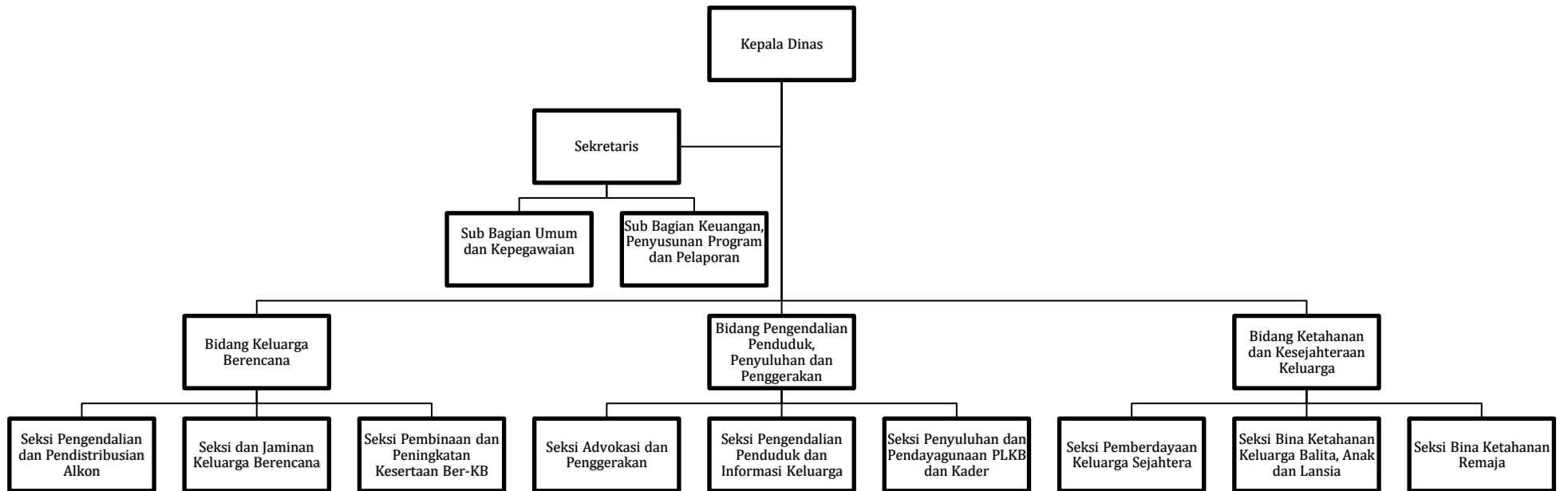
1. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal
3. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
4. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota
5. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB
6. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator keberhasilan yang ingin dicapai meliputi:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Total Fertility Rate (TFR)
3. Presentase Peserta KB Aktif
4. Presentase *Unmet Need*
5. Presentase usia perkawinan pertama wanita dibawah 20 tahun

4.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi yang terdapat di dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut.



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari sekretaris dinas. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan ber-KB
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari sekretaris dinas. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 - b. Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
6. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unit yang dibentuk dalam rangka membantu tugas Dinas agar dapat melayani masyarakat secara optimal. UPT yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah UPT yang ada di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
3. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
5. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten
6. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten dan Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
7. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB atau PLKB)
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan terdiri atas:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi. Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengembangan penyuluhan, advokai dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Penyusunan konsep strategi pengembangan jaringan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- c. Penyusunan konsep strategi pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan kehumasan di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan komponen, instandu terkait dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan kehumasan program kependudukan dan keluarga berencana
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan advokasi, informasi, edukasi dan kehumasan program kependudukan dan keluarga berencana
- g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantapan dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyuluhan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Pelaksanaan motivasi, bimbingan kelembagaan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan institusi masyarakat/kader keluarga berencana dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana di lini lapangan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitas penyuluhan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengumpulan, penyebarluasan informasi, analisis dan evaluasi penyusunan parameter pengendalian penduduk pada kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan dokumentasi data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pembinaan dan pencacatan dan pelaporan data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Penataan dokumentasi data penduduk, keluarga berencana dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- e. Pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

4.2 Alur Perolehan Data

Data yang akan dianalisis di dalam laporan ini merupakan kategori data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan Statistika Rutin berupa Laporan Program Keluarga Berencana Nasional yang termasuk kedalam Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA). Data sekunder yang berupa kumpulan laporan ini didapatkan dengan cara mengakses website <https://aplikasi.bkkbn.go.id>. Data yang terdapat di dalam website ini merupakan data mengenai Program Keluarga Berencana untuk seluruh wilayah di Indonesia. Data di dalam website ini memiliki akses yang terbuka, sehingga untuk melihat data tersebut tidak diperlukan izin khusus. Data yang ada di dalam website ini terdiri dari 2 laporan yaitu Laporan Pelkon (Laporan Pelayanan Kontrasepsi) dan Laporan Dalap (Laporan Pengendalian Lapangan)

4.2.1 Laporan Pelkon (Laporan Pelayanan Kontrasepsi)

Laporan Pelkon merupakan laporan yang didapat dari setiap fasilitas kesehatan yang ada di suatu wilayah. Alur input data untuk laporan Pelkon adalah setiap faskes yang ada di suatu wilayah diwajibkan untuk menginput data sesuai form yang tersedia dan disesuaikan juga dengan kondisi lapangan. Laporan Pelkon disajikan dalam 2 tipe yaitu laporan tahunan dan laporan bulanan.

1. Laporan Tahunan

Laporan tahunan yang terdapat di dalam Statistika Rutin adalah sebagai berikut:

- a. Tabel 1A mengenai Jumlah Faskes KB berdasarkan jenis faskes KB dan status kerjasama dengan BPJS Kesehatan
- b. Tabel 2A mengenai Jumlah Faskes KB berdasarkan status dan kepemilikan faskes KB
- c. Tabel 3A mengenai Jumlah dan klasifikasi faskes KB serta jumlah rata-rata pelayanan kontrasepsi
- d. Tabel 4A mengenai Jumlah jejaring faskes KB
- e. Tabel 5A mengenai Tenaga dokter yang telah mengikuti pelatihan teknis pelayanan
- f. Tabel 6A mengenai Jumlah sarana dan perlengkapan Faskes KB yang bisa dipakai

2. Laporan Bulanan

Laporan ini tersedia mulai dari level kabupaten hingga provinsi. Laporan tahunan yang terdapat di dalam SIDUGA adalah sebagai berikut:

- a. Tabel 1 mengenai cakupan laporan dan tempat pelayanan KB
- b. Tabel 2 mengenai hasil pelayanan peserta KB Baru pemberian *Informed consent*
- c. Tabel 3 mengenai Pencapaian indikator PPM peserta KB Baru menurut metode kontrasepsi
- d. Tabel 3A mengenai hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh Faskes KB Pemerintah
- e. Tabel 3B mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh Faskes KB Swasta

- f. Tabel 3C mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh faskes jejaring (Praktik Dokter)
- g. Tabel 3D mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh faskes jejaring (Praktik Bidan Mandiri)
- h. Tabel 3E mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh jejaring Faskes KB Lainnya
- i. Tabel 4 mengenai Jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I menurut metode kontrasepsi
- j. Tabel 4A mengenai Jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilayani oleh Faskes KB Pemerintah
- k. Tabel 4B mengenai jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilayani oleh Faskes KB Swasta
- l. Tabel 4C mengenai Jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilayani oleh Faskes jejaring (Praktik Dokter)
- m. Tabel 4D mengenai Jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilayani oleh Faskes jejaring (Praktik Bidan Mandiri)
- n. Tabel 4E mengenai Jumlah peserta KB Baru Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilayani oleh jejaring faskes lainnya
- o. Tabel 5A mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru pasca persalinan dan keguguran menurut metode kontrasepsi
- p. Tabel 5B mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru pasca persalinan dan keguguran menurut tempat pelayanan
- q. Tabel 6 mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru peserta Jaminan Kesehatan Nasional menurut metode kontrasepsi
- r. Tabel 7A mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru di Kabupaten Galciltas dan Kepulauan
- s. Tabel 7B mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru di Kabupaten tertinggal menurut jenis kontrasepsi
- t. Tabel 7C mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru di Kabupaten terpencil menurut jenis kontrasepsi
- u. Tabel 7D mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru di Kabupaten perbatasan menurut jenis kontrasepsi
- v. Tabel 7E mengenai Hasil pelayanan peserta KB Baru di Kabupaten Kepulauan menurut jenis kontrasepsi
- w. Tabel 8A mengenai jumlah komplikasi berat dan kegagalan menurut metode kontrasepsi
- x. Tabel 8B mengenai Jumlah pencabutan IUD dan Implan menurut tempat pelayanan
- y. Tabel 9A mengenai Jumlah Pemberian kontrasepsi ulang yang dilayani oleh Faskes KB Pemerintah
- z. Tabel 9B mengenai Jumlah pemberian kontrasepsi ulang yang dilayani oleh faskes jejaring

- aa. Tabel 10A mengenai Jumlah pelayanan kontrasepsi ganti cara yang dilayani oleh faskes KB Pemerintah dan swasta
- bb. Tabel 10B mengenai Jumlah pelayanan kontrasepsi ganti cara yang dilayani oleh faskes jejaring
- cc. Tabel 11 mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di semua faskes KB
- dd. Tabel 11A mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di Faskes KB Pemerintah
- ee. Tabel 11 B mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di Faskes KB Swasta
- ff. Tabel 11C mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di jejaring faskes KB (Praktik Dokter)
- gg. Tabel 11D mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di jejaring faskes KB (Praktik bidan mandiri)
- hh. Tabel 11E mengenai Jumlah persediaan alat kontrasepsi di jejaring faskes KB Lainnya

4.2.2 Laporan Dalap (Laporan Pengendalian Lapangan)

Laporan dalap ini merupakan laporan yang pengumpulannya dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana (PKB). PKB akan mengambil data mengenai program keluarga berencana pada setiap desa di wilayah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya dilakukan penginputan melalui website resmi statistika rutin (<https://aplikasi.bkkbn.go.id>). Laporan Dalap juga tersaji dalam Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan.

1. Laporan Tahunan

Laporan tahunan yang termasuk dalam Laporan Dalap adalah sebagai berikut.

- a. Tabel 1 mengenai Cakupan data potensi wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW dan RT
- b. Tabel 2A mengenai Jumlah dan presentase petugas tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan
- c. Tabel 2B mengenai Jumlah PLKB yang sudah mengikuti pelatihan
- d. Tabel 2C mengenai Jumlah PKB yang sudah mengikuti pelatihan
- e. Tabel 2D mengenai Jumlah petugas KB desa/kelurahan yang sudah mengikuti pelatihan
- f. Tabel 3A mengenai Institusi masyarakat pedesaan PPKBD
- g. Tabel 3B mengenai Institusi masyarakat pedesaan Sub PPKBD
- h. Tabel 3C mengenai Institusi masyarakat pedesaan Kelompok KB
- i. Tabel 4 mengenai Kelompok kegiatan keluarga BKB
- j. Tabel 5 mengenai Kelompok kegiatan keluarga BKR dan BKL
- k. Tabel 6 mengenai Kader kelompok kegiatan BKB, sarana dan balita yang dimiliki
- l. Tabel 7 mengenai kader kelompok kegiatan BKR
- m. Tabel 8 mengenai Kader kelompok BKL
- n. Tabel 9 mengenai Kelompok kegiatan ekonomi keluarga yang mengakses sumber modal

- o. Tabel 10 mengenai Mupen di Kabupaten atau Kota
 - p. Tabel 11 mengenai Jumlah dan presentase pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa
2. Laporan Bulanan
- a. Tabel 1 mengenai Cakupan laporan data wilayah dan institusi KB di lapangan
 - b. Tabel 2 mengenai Cakupan Laporan PIK remaja
 - c. Tabel 3 mengenai frekuensi operasional Mupen dan Rakor KB
 - d. Tabel 4 mengenai Frekuensi operasional penyuluhan dan KIE KB
 - e. Tabel 5 mengenai Frekuensi gerak Muan KB dan operasional tim KB Keliling
 - f. Tabel 6 mengenai Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
 - g. Tabel 7 mengenai Status PUS dan Kesertaan Ber-KB Anggota BKB
 - h. Tabel 8 mengenai Pembinaan kelompok BKL
 - i. Tabel 9 mengenai Status US dan Kesertaan Ber-KB anggota BKR
 - j. Tabel 10 mengenai Pembinaan kelompok BKR
 - k. Tabel 11 mengenai Status US dan Kesertaan Ber-KB anggota BKL
 - l. Tabel 12 mengenai Pembinaan kelompok BKL
 - m. Tabel 13 mengenai Kelompok UPPKS yang mendapat akses modal dari berbagai sumber
 - n. Tabel 14 mengenai Pasanan usia subur dan kesertaan JKN
 - o. Tabel 15 mengenai Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi
 - p. Tabel 16 mengenai Peserta KB Aktif KPS dan KS I menurut metode kontrasepsi
 - q. Tabel 17 mengenai Peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi pada jalur pelayanan pemerintah
 - r. Tabel 18 mengenai Peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi pada jalur pelayanan swasta
 - s. Tabel 19 mengenai Peserta KB Aktif Jaminan Kesehatan Nasional penerima Bantuan Iuran menurut metode kontrasepsi
 - t. Tabel 20 mengenai Peserta KB Aktif bukan Jaminan Kesehatan Nasional penerima Bantuan Iuran menurut metode kontrasepsi
 - u. Tabel 21 mengenai Pasangan Usia Subur bukan peserta KB
 - v. Tabel 22 mengenai Pasangan Usia Subur KPS dan KS I bukan peserta KB
 - w. Tabel 23 mengenai Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran
 - x. Tabel 24 mengenai Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB Jaminan Kesehatan Nasional bukan Penerima Bantuan Iuran
 - y. Tabel 25 mengenai Pencapaian terhadap PPM peserta KB Aktif
 - z. Tabel 25L mengenai Pencapaian terhadap PPM peserta KB Aktif

Dari sekian banyak tabel yang tersaji di dalam Laporan Statistika Rutin berikut merupakan data yang akan dianalisis:

No	Kecamatan	Jumlah PUS	KB Aktif	% KB Aktif	Unmet Need			% Unmet Need	MKJP	%MKJP	Non MKJP	%Non MKJP
					Ingin anak ditunda	Tidak ingin anak lagi	Total					
350216	Babadan	10.797	6163	57,08	538	354	892	8,26	2472	40,11	3691	59,89
350213	Badegan	5.921	3932	66,41	582	632	1.214	20,50	1581	40,21	2351	59,79
350211	Balong	8.363	5570	66,60	468	849	1.317	15,75	2814	50,52	2756	49,48
350203	Bungkal	7.107	4767	67,07	313	388	701	9,86	3005	63,04	1762	36,96
350220	Jambon	9.113	6157	67,56	808	701	1.509	16,56	2225	36,14	3932	63,86
350218	Jenangan	11.102	7271	65,49	878	1.126	2.004	18,05	1999	27,49	5272	72,51
350209	Jetis	5.792	3878	66,95	373	359	732	12,64	1045	26,95	2833	73,05
350212	Kauman	7.515	4938	65,71	661	751	1.412	18,79	2801	56,72	2137	43,28
350208	Mlarak	5.579	3758	67,36	265	254	519	9,30	1585	42,18	2173	57,82
350219	Ngebel	3.761	2366	62,91	437	408	845	22,47	1212	51,23	1154	48,77
350202	Ngrayun	10.426	6937	66,54	531	522	1.053	10,10	2198	31,69	4739	68,31
350217	Ponorogo	10.720	4773	44,52	788	3.546	4.334	40,43	3004	62,94	1769	37,06
350221	Pudak	2.115	1450	68,56	76	321	397	18,77	941	64,90	509	35,10
350207	Pulung	11.451	7841	68,47	506	579	1.085	9,48	4106	52,37	3735	47,63
350204	Sambit	8.860	5974	67,43	635	496	1.131	12,77	2641	44,21	3333	55,79
350214	Sampung	7.085	4744	66,96	348	257	605	8,54	2113	44,54	2631	55,46
350205	Sawoo	11.245	7455	66,30	597	680	1.277	11,36	3797	50,93	3658	49,07
350210	Siman	8.691	6032	69,41	217	244	461	5,30	3925	65,07	2107	34,93
350201	Slahung	10.484	7105	67,77	560	485	1.045	9,97	3844	54,10	3261	45,90
350206	Sooko	4.735	3068	64,79	250	156	406	8,57	1430	46,61	1638	53,39
350215	Sukorejo	10.099	6780	67,14	994	1.087	2.081	20,61	3289	48,51	3491	51,49

4.3 Studi Kasus

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan Laju pertumbuhan penduduk sebagai indikator kinerja utamanya. Faktor yang mempengaruhi penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk diantaranya adalah:

- a. Berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana
- b. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam Ber-KB
- c. Angka kematian yang lebih besar daripada angka kelahiran
- d. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk setempat ke daerah lain

Selain Laju Pertumbuhan Penduduk, TFR (*Total Fertility Rate*) juga menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. TFR merupakan jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Faktor yang mempengaruhi penurunan TFR diantaranya adalah berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak peran serta masyarakat dalam ber-KB dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan ber-KB. Keikutsertaan ber-KB memiliki peran yang penting dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun keikutsertaan ber-KB ini mengalami berbagai masalah dalam pelaksanaannya.

Indikator keberhasilan lainnya adalah Presenase KB Aktif, Presentase *unmet need*, dan presentase usia perkawinan pertama wanita dibawah 20 tahun. Cakupan mengenai kepesertaan Ber-KB serta *unmet need* menjadi salah satu masalah program KB dan juga menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 kepesertaan KB Aktif di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 79,18% PUS yang menjadi peserta KB Aktif, lalu pada tahun 2020 turun menjadi 75,54%, dan tahun 2021 Kepesertaan KB Aktif turun menjadi 72,17%. Kabupaten Ponorogo yang menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang juga mengalami penurunan presentasi peserta KB Aktif. Pada tahun 2019 terdapat 67,09% PUS yang menjadi peserta KB Aktif, lalu pada tahun 2020 turun menjadi 66,74, dan pada tahun 2021 kembali turun menjadi 64,84%. Hal ini juga berkaitan dengan target yang belum tercapai, dimana pada tahun 2021 target cakupan peserta KB Aktif mencapai 66,05%.

Selain masalah kepesertaan KB Aktif yang turun dalam 3 tahun terakhir, masalah *unmet need* juga menjadi salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Presentase angka kejadian *unmet need* di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 13,15% *unmet need* dan pada tahun 2021 naik menjadi 14,6%. Selain itu, angka kejadian *unmet need* ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu 7,4% pada tahun 2021.

Dengan turunnya kepesertaan KB Aktif dan naiknya angka *unmet need*, dapat dilakukan pemetaan mengenai cakupan KB Aktif dan kejadian *unmet need* pada setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis yang salah satunya yaitu dengan pembuatan peta tematik. Dengan pengaplikasian Sistem Informasi Geografis ini diharapkan dapat memudahkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memonitoring wilayah kecamatan mana yang

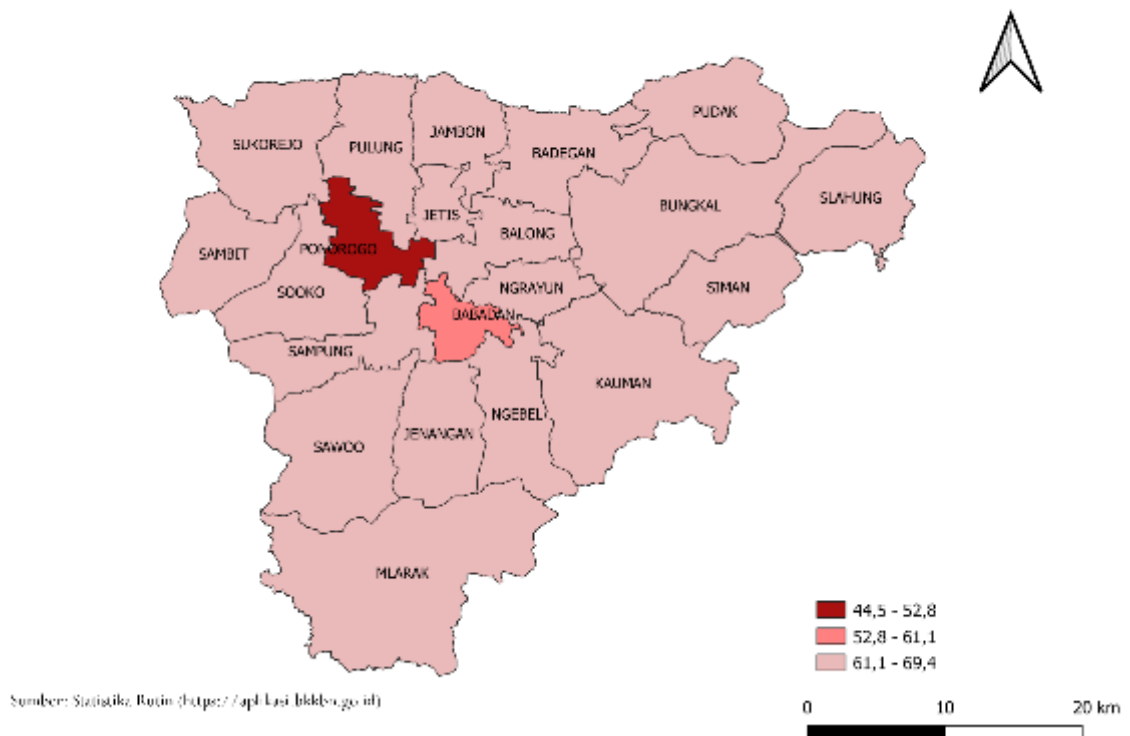
memiliki cakupan KB Aktif rendah dan kejadian *unmet need* yang rendah. Selain itu, dengan pembuatan peta tematik ini dapat juga dimanfaatkan untuk memonitoring jenis alat kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Hal ini bisa menjadi salah satu cara dalam memonitoring pengguna MKJP yang masih rendah pada suatu wilayah kecamatan. Wilayah dengan pengguna MKJP yang rendah akan memiliki risiko tinggi terjadi drop out sehingga menyebabkan cakupan KB Aktif yang rendah.

Pengaplikasian Sistem Informasi Geografis berupa pembuatan peta tematik dilakukan dengan memanfaatkan data yang terdapat dalam Statistika Rutin. data yang digunakan merupakan data yang berasal dari Laporan Pengendalian Lapangan (Laporan Dalap) wilayah Kabupaten Ponorogo Tabel 15 mengenai Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi dan Tabel 21 mengenai Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB.

4.3.1 Peta Persebaran Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif adalah cakupan dari peserta KB Baru dan Lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan Peserta KB Aktif dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan Program Keluarga Berencana di suatu wilayah. Berikut merupakan hasil Pemetaan Cakupan Peserta KB Aktif per wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

PEMETAAN CAKUPAN PESERTA KB AKTIF



Pemetaan cakupan peserta KB Aktif dilakukan menggunakan bantuan software Quantum GIS. Pemetaan ini menggunakan pengklasifikasian dengan metode equal interval. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, mayoritas wilayah wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo menjadi wilayah dengan cakupan KB Aktif yang tinggi yaitu 61,1%-69,4%. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki cakupan KB

Aktif rendah yaitu 44,5%-52,8% adalah wilayah Kecamatan Ponorogo. Sedangkan wilayah dengan cakupan KB Aktif yang sedang yaitu 52,8%-61,1% adalah wilayah Kecamatan Babadan. Keputusan PUS untuk ber-KB dipengaruhi oleh banyak faktor seperti misalnya tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi lainnya.

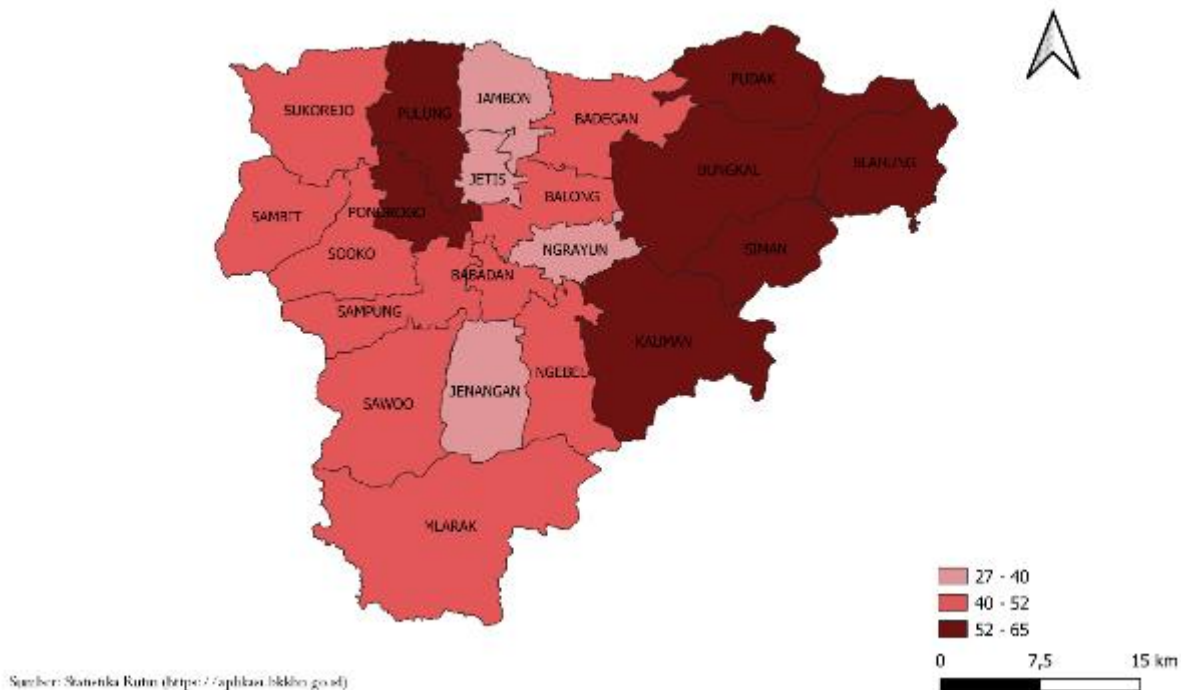
Pemetaan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan cakupan KB Aktif di Kabupaten Ponorogo tergolong tinggi dan merata di seluruh wilayah. Namun tetap diperlukan peningkatan cakupan KB Aktif pada wilayah dengan Cakupan KB Aktif yang masih sedang hingga rendah. Beberapa cara bisa dilakukan seperti lebih menggalakkan kembali mengenai pentingnya ber-KB, memberikan pemahaman bagi masyarakat yang masih memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai KB seperti misalnya efek samping yang akan timbul, pembuatan media-media KIE, dan lain sebagainya.

4.3.2 Peta Persebaran Peserta KB Aktif berdasarkan metode kontrasepsi

Berdasarkan jangka waktunya, jenis metode kontrasepsi dibedakan menjadi 2 yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek.

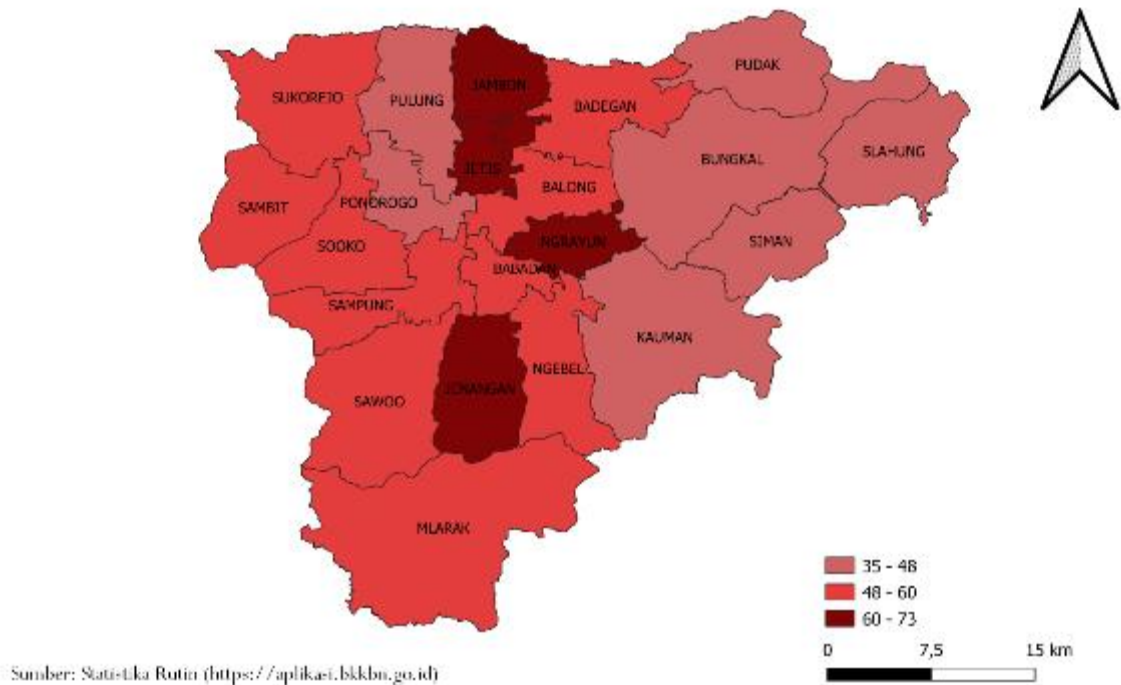
a. Hasil pemetaan Peserta KB Aktif MKJP

PEMETAAN PESERTA KB AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG



Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebanyak 7 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis MKJP tergolong tinggi yaitu mencapai 52%-65%. Sebanyak 10 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis MKJP tergolong sedang yaitu mencapai 40%-52%. Sedangkan sebanyak 4 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis MKJP tergolong rendah yaitu hanya 27%-40%.

b. Hasil pemetaan Peserta KB Aktif non MKJP

PEMETAAN PESERTA KB AKTIF NON MKJP

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebanyak 4 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis non MKJP tergolong tinggi yaitu mencapai 60%-73%. Sebanyak 10 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis non MKJP tergolong sedang yaitu mencapai 48%-60%. Sedangkan sebanyak 7 dari 21 kecamatan merupakan kecamatan dengan pengguna KB jenis non MKJP tergolong rendah yaitu hanya 35%-48%.

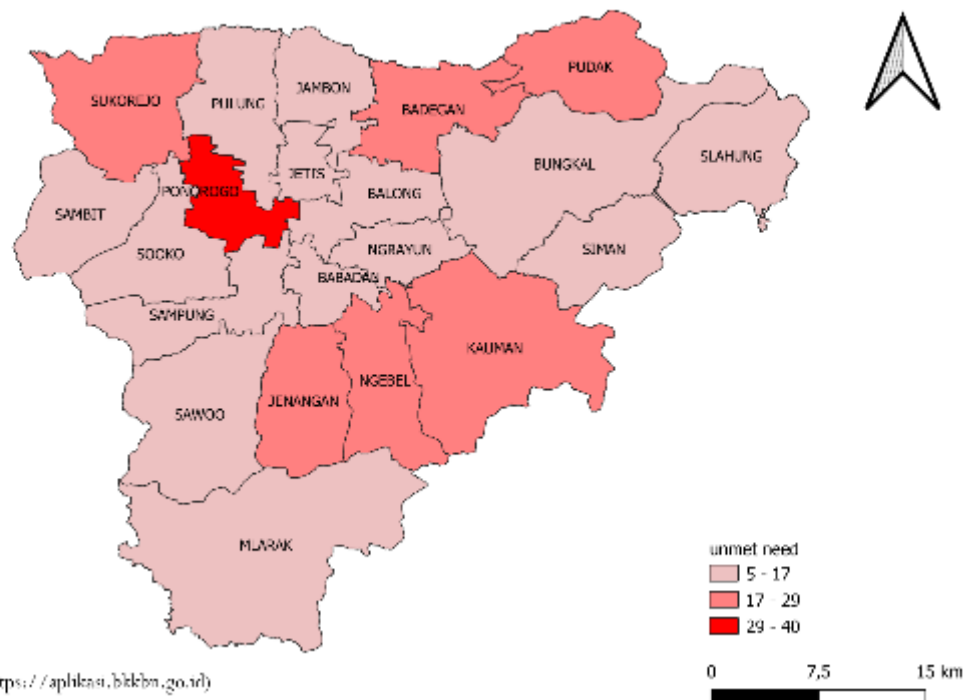
Peserta KB yang menggunakan metode kontrasepsi non MKJP rawan akan terjadi drop out. Drop out disini bisa disebabkan karena masyarakat yang kurang tertarik dengan KB sehingga memilih untuk tidak melanjutkan program KB, tidak cocok terhadap alat kontrasepsi yang dipakai, mengalami efek samping dan lain sebagainya. Untuk menghindari angka drop out yang tinggi, sangat disarankan masyarakat agar menggunakan MKJP. Penggunaan metode kontrasepsi yang termasuk dalam MKJP merupakan kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 2 tahun. Metode kontrasepsi jangka panjang ini lebih efektif dan efisien untuk menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin mempunyai anak lagi dibandingkan metode kontrasepsi yang berjangka pendek. Penggunaan jenis metode kontrasepsi MKJP sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, pemahaman mengenai efek samping yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, dan lain sebagainya. Secara mayoritas jenis metode kontrasepsi jangka panjang belum banyak diminati oleh PUS di Kabupaten Ponorogo.

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya wilayah kecamatan dimana pengguna KB non MKJP menjadi mayoritas.

4.3.3 Peta Persebaran *unmet need*

Unmet need merupakan salah satu masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana. *Unmet need* adalah presentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat atau obat kontrasepsi. Berikut merupakan pemetaan kejadian *unmet need* per wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

PEMETAAN UNMET NEED KABUPATEN PONOROGO



Sumber: Statistika Rumah (<https://aplikasi.bkkbn.go.id>)

Hasil pemetaan menunjukkan 1 dari 21 kecamatan memiliki kejadian *unmet need* tergolong tinggi yaitu mencapai 29%-40%. Sebanyak 6 dari 21 Kecamatan memiliki prevalensi kejadian *unmet need* tergolong sedang yaitu 17%-29%. Sebanyak 14 dari 21 Kecamatan memiliki prevalensi kejadian *unmet need* tergolong rendah yaitu 5%-17%.

Tingginya angka *Unmet need* di suatu wilayah mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat pada tingginya angka kelahiran sehingga bisa memicu terjadinya ledakan penduduk. Selain itu, banyaknya kejadian *unmet need* bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan diantaranya kematian ibu dan kematian bayi. Beberapa program telah dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan kejadian *unmet need* seperti pelayanan KIE, Pembinaan KB, Pelayanan Konseling KB, Pelayanan Pemasangan kontrasepsi, dan pelayanan KB Medis.

Analisis

Dari hasil pemetaan yang telah dilakukan, terdapat satu kecamatan yang harus mendapatkan perhatian khusus yaitu Kecamatan Ponorogo. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dari 2 kecamatan dengan cakupan KB Aktif yang paling rendah diantara wilayah kecamatan yang lain. Selain itu, Kecamatan Ponorogo juga menjadi satu-satunya kecamatan dengan prevalensi kejadian *unmet need* tertinggi antara 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Cakupan KB Aktif yang rendah pada kecamatan ini kemungkinan bukan karena angka drop out yang tinggi, dikarenakan pada kecamatan ini, mayoritas peserta KB sudah menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Kemungkinan penyebab cakupan KB Aktif yang rendah adalah dikarenakan pengetahuan yang masih kurang, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Selain itu, kecamatan ini juga memiliki prevalensi *unmet need* yang tergolong tinggi. Hal ini bisa memicu timbulnya ledakan penduduk dan masalah kesehatan lainnya. Untuk mengatasi cakupan KB Aktif yang rendah dan *unmet need* yang tinggi dapat dilakukan berbagai intervensi seperti misalnya mengadakan kampanye ber-KB, memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang KB, pembuatan berbagai media KIE dan lain sebagainya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan lebih memberdayakan Penyuluh KB yang berada pada setiap kecamatan untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat di kecamatan wilayah masing-masing.

Peran dari Penyuluh KB maupun kader kb lainnya sangat penting dalam hal untuk memotivasi masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur yang memang membutuhkan KB agar melakukan KB. Selain itu, peran dari penyuluh KB ini bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program KB memang sudah mendapatkan pelayanan KB sesuai dengan yang dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk memetakan kondisi cakupan suatu program pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Salah satu penerapan Sistem Informasi geografis adalah dalam pemetaan cakupan KB Aktif, Jenis metode kontrasepsi yang mayoritas digunakan, dan pemetaan kejadian *unmet need*.

Hasil pemetaan cakupan KB Aktif menunjukkan hasil bahwa secara mayoritas kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo memiliki cakupan KB Aktif antara 61% sampai 69%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di seluruh wilayah sudah merata. Namun perlu menjadi perhatian bahwa pada Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Babadan memiliki cakupan yang masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lain di sekitarnya. Hal ini bisa menjadi acuan bagi Pemerintah khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana untuk memberikan intervensi lebih khusus agar kedua kecamatan ini memiliki cakupan KB Aktif yang tinggi.

Hasil pemetaan mengenai jenis metode kontrasepsi yang sering digunakan, didapatkan hasil bahwa mayoritas pengguna KB Aktif menggunakan jenis metode kontrasepsi non MKJP seperti pil, suntik, dan kondom. Namun pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pulung, Ponorogo, Pudak, Bungkal, Siman, Slahung dan Kauman mayoritas pengguna KB Aktif sudah menggunakan jenis metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, MOW, MOP ataupun implan.

Hasil pemetaan mengenai prevalensi kejadian *unmet need* menunjukkan bahwa terdapat 1 kecamatan yang memiliki prevalensi kejadian *unmet need* yang tinggi dan 6 kecamatan dengan prevalensi kejadian *unmet need* tergolong sedang. Secara keseluruhan, meskipun mayoritas wilayah kecamatan memiliki prevalensi kejadian *unmet need* yang rendah, namun angka prevalensi ini masih belum sesuai dengan target yang telah dibuat yaitu 7,4% pada tahun 2021.

Wilayah kecamatan Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan pada wilayah kecamatan ini, cakupan KB Aktif masih sangat rendah dan prevalensi kejadian *unmet need* pada wilayah ini juga tinggi jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi terkait program keluarga berencana.

5.2 Saran

Hasil pemetaan yang telah dibuat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program KB di Kabupaten Ponorogo. Selain itu, diharapkan juga, dalam pemberian intervensi terkait program KB juga memperhatikan kondisi pada wilayah kecamatan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2017). *Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran*
[https://jdih.go.id/files/241/PERKA 24 2017 KB PPPK.pdf](https://jdih.go.id/files/241/PERKA%202017%20KB%20PPPK.pdf)
- BKKBN. (2021). *Statistika Rutin*
<https://aplikasi.bkkbn.go.id>
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Pustaka Ilmu.
- Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beerencana 2021-2026 Sistem Informasi Geografi*. (2012). <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20200903090859.pdf>
- Sugaadi, D., Somantri, L., & Sugito, N. T. (2009). *Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195805261986031-DEDE_SUGANDI/HAND_OUT_SIG.pdf

LAMPIRAN

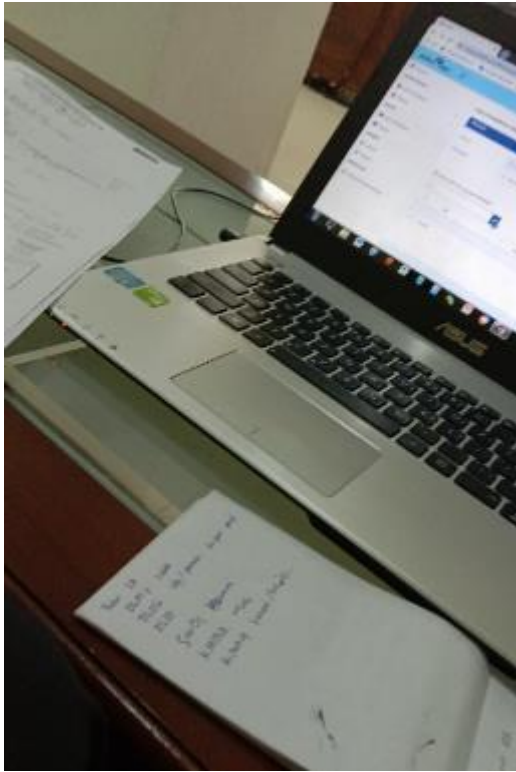
Lampiran 1 Daftar Kehadiran dan Dokumentasi Magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA Bella Dwi Saputri
 NIM 101811133078
 TEMPAT MAGANG Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu pertama		
Hari ke-1 (Senin, 17-1-2022)	Melakukan input data PKB ke Aplikasi SIGA BKKBN	
Hari ke-2 (Selasa, 18-1-2022)	Melakukan rekap jumlah KB Aktif per desa di seluruh Kabupaten Ponorogo	
Hari ke-3 (Rabu, 19-1-2022)	Melakukan rekap jumlah PUS per desa di seluruh Kabupaten Ponorogo	
Hari ke-4 (Kamis, 20-1-2022)	Melakukan rekap jumlah Unmet Need per desa di seluruh Kabupaten Ponorogo	
Hari ke-5 (Jumat, 21-1-2022)	Menghitung cakupan KB Aktif tiap desa/kelurahan di Kabupaten Ponorogo	

Dokumentasi Pelaksanaan Magang



Ringkasan

Jumlah Keluarga / Jiwa: 300 / 905

Jumlah PUS: 154

Jumlah Wanita Hamil: 5

Jumlah Unmet Need: 50

Deserta KB Aktif

Metode	Prevalensi	Swasta	Lainnya	Jumlah
RUJUK	0	10	0	10
MOW	0	1	0	1
MUM	0	0	0	0
IMPLANT	0	0	0	0
SUN BOND	0	51	0	51
TIC	0	11	0	11
KORUKIM	0	2	0	2
MAL	0	0	0	0
TRADISIONAL	0	0	0	0
Total	0	87	0	87

PUS Bukan Pat KB: 62

Ingin Anak: 3






Ingin Anak Ditunda: 29

No	Nama	Jumlah	Unit	Harga	Total
107	Pelayanan	140	100	140	140,00
108	Keperawatan	300	200	150	450,00
109	Keperawatan	300	200	150	450,00
110	Keperawatan	300	200	150	450,00
111	Keperawatan	300	200	150	450,00
112	Keperawatan	300	200	150	450,00
113	Keperawatan	300	200	150	450,00
114	Keperawatan	300	200	150	450,00
115	Keperawatan	300	200	150	450,00
116	Keperawatan	300	200	150	450,00
117	Keperawatan	300	200	150	450,00
118	Keperawatan	300	200	150	450,00
119	Keperawatan	300	200	150	450,00
120	Keperawatan	300	200	150	450,00
121	Keperawatan	300	200	150	450,00
122	Keperawatan	300	200	150	450,00
123	Keperawatan	300	200	150	450,00
124	Keperawatan	300	200	150	450,00
125	Keperawatan	300	200	150	450,00
126	Keperawatan	300	200	150	450,00
127	Keperawatan	300	200	150	450,00
128	Keperawatan	300	200	150	450,00
129	Keperawatan	300	200	150	450,00
130	Keperawatan	300	200	150	450,00
131	Keperawatan	300	200	150	450,00
132	Keperawatan	300	200	150	450,00
133	Keperawatan	300	200	150	450,00
134	Keperawatan	300	200	150	450,00
135	Keperawatan	300	200	150	450,00
136	Keperawatan	300	200	150	450,00
137	Keperawatan	300	200	150	450,00
138	Keperawatan	300	200	150	450,00
139	Keperawatan	300	200	150	450,00
140	Keperawatan	300	200	150	450,00
141	Keperawatan	300	200	150	450,00
142	Keperawatan	300	200	150	450,00
143	Keperawatan	300	200	150	450,00
144	Keperawatan	300	200	150	450,00
145	Keperawatan	300	200	150	450,00
146	Keperawatan	300	200	150	450,00
147	Keperawatan	300	200	150	450,00
148	Keperawatan	300	200	150	450,00
149	Keperawatan	300	200	150	450,00
150	Keperawatan	300	200	150	450,00

No	Nama	Jumlah	Unit	Harga	Total
1	Pelayanan	140	100	140	140,00
2	Keperawatan	300	200	150	450,00
3	Keperawatan	300	200	150	450,00
4	Keperawatan	300	200	150	450,00
5	Keperawatan	300	200	150	450,00
6	Keperawatan	300	200	150	450,00
7	Keperawatan	300	200	150	450,00
8	Keperawatan	300	200	150	450,00
9	Keperawatan	300	200	150	450,00
10	Keperawatan	300	200	150	450,00
11	Keperawatan	300	200	150	450,00
12	Keperawatan	300	200	150	450,00
13	Keperawatan	300	200	150	450,00
14	Keperawatan	300	200	150	450,00
15	Keperawatan	300	200	150	450,00
16	Keperawatan	300	200	150	450,00
17	Keperawatan	300	200	150	450,00
18	Keperawatan	300	200	150	450,00
19	Keperawatan	300	200	150	450,00
20	Keperawatan	300	200	150	450,00
21	Keperawatan	300	200	150	450,00
22	Keperawatan	300	200	150	450,00
23	Keperawatan	300	200	150	450,00
24	Keperawatan	300	200	150	450,00
25	Keperawatan	300	200	150	450,00
26	Keperawatan	300	200	150	450,00
27	Keperawatan	300	200	150	450,00
28	Keperawatan	300	200	150	450,00
29	Keperawatan	300	200	150	450,00
30	Keperawatan	300	200	150	450,00

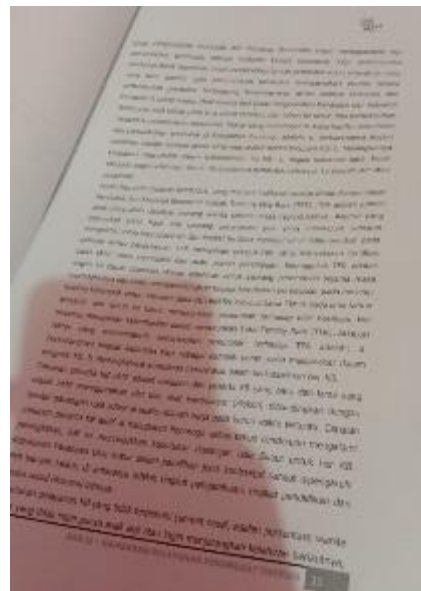
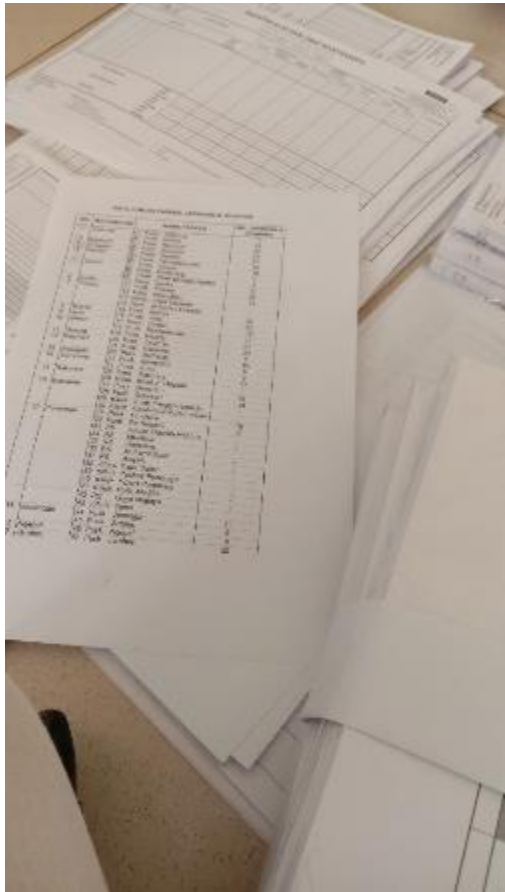
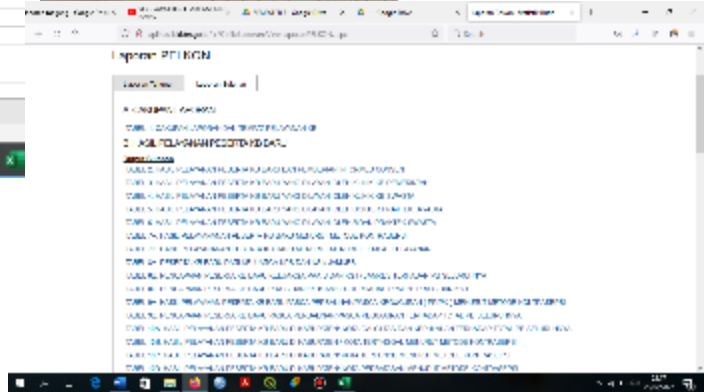
LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Bella Dwi Saputri
 NIM : 101811133078
 TEMPAT MAGANG : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu kedua		
Hari ke-6 (Senin, 24-1-2022)	Mengidentifikasi desa di Kabupaten Ponorogo dengan cakupan pengguna KB dibawah 50%	
Hari ke-7 (Selasa, 25-1-2022)	Menyiapkan formulir KB yang akan dibagikan pada setiap fasilitas kesehatan yang ada di Ponorogo	
Hari ke-8 (Rabu, 26-1-2022)	Melakukan penyortiran blangko/formulir registrasi pelayanan KB untuk setiap fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Ponorogo	
Hari ke-9 (Kamis, 27-1-2022)	Mencari informasi mengenai macam kepesertaan KB dan masalah yang ada di Kabupaten Ponorogo terkait pelayanan KB	
Hari ke-10 (Jumat, 28-1-2022)	Mengidentifikasi data sekunder yang terdapa di situs http://aplikasi.bkkbn.go.id	






Dokumentasi Pelaksanaan Magang

	A	B	C	D	E
1	Name Desa	Jumlah PUS	Jumlah Utamad Need	Jumlah KB Aktif	Cakupan KB (%)
2	Stangkung				
3	Nglin-lin	520	160	150	85,51
4	Dum	610	288	250	41,18
5	Nglomaha	128	68	60	37,97
6	Labang	200	120	110	40,81
7	Orakak	500	130	140	47,52
8	Gundik	208	140	140	48,29
9	Nalari	268	120	68	26,88
10	Gombang	150	68	68	43,55
11	Janti	500	120	100	47,52
12	Bungkil				
13	Belare	280	90	120	47,27
14	Bembek	320	170	130	38,94
15	Pager	280	120	110	42,7
16	Bolong	200	90	80	42,22
17	Bungkal	420	160	210	49,18
18	Kunti	200	100	80	35,75

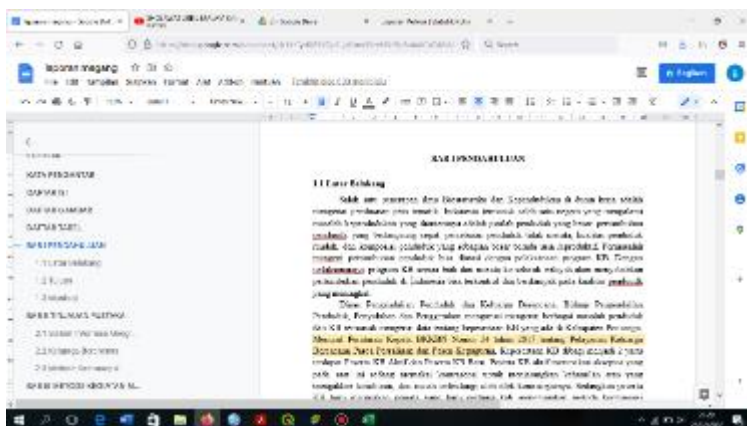


LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Bella Dwi Saputri
 NIM : 101811133078
 TEMPAT MAGANG : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ketiga		
Hari ke-11 (Senin, 31-1-2022)	Membantu proses pembuatan surat menyurat kepada tiap desa dan kecamatan di Kabupaten Ponorogo untuk menginformasikan mengenai perlombaan kampung KB	
Hari ke-12 (Selasa, 1-2-2022)	Melakukan monitoring NEWSIGA mengenai update data di tiap kecamatan di wilayah Ponorogo	
Hari ke-13 (Rabu, 2-2-2022)	Melakukan monitoring NEWSIGA mengenai update data di tiap kecamatan di wilayah Ponorogo	
Hari ke-14 (Kamis, 3-2-2022)	Menyusun Laporan Magang	
Hari ke-15 (Jumat, 4-2-2022)	Menyusun Laporan Magang	

Dokumentasi Pelaksanaan Magang



LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Bella Dwi Saputri
 NIM : 101811133078
 TEMPAT MAGANG : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

Minggu keempat		
Hari ke-16 (Senin, 7-2-2022)	Membantu proses rekap SPJ seksi advokasi mengenai pengadaan media KIE	<i>BDS</i>
Hari ke-17 (Selasa, 8-2-2022)	Membantu proses rekap SPJ seksi advokasi mengenai kegiatan POKJA Kampung KB	<i>BDS</i>
Hari ke-18 (Rabu, 9-2-2022)	Melakukan monitoring input data SIGA	<i>BDS</i>
Hari ke-19 (Kamis, 10-2-2022)	Membantu surat menyurat	<i>BDS</i>
Hari ke-20 (Jumat, 11-2-2022)	Menyusun laporan magang	<i>BDS</i>

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi
 Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Bella Dwi Saputri
 NIM : 101811133078
 TEMPAT MAGANG : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

Minggu kelima		
Hari ke-21 (Senin, 14-2-2022)	Monitoring kelengkapan data verifikasi pengelolaan kampung KB yang ada di Kabupaten Ponorogo	<i>gdi</i>
Hari ke-22 (Selasa, 15-2-2022)	Melakukan rekapitulasi nilai hasil verifikasi kampung KB tahun 2022	<i>gdi</i>
Hari ke-23 (Rabu, 16-2-2022)	Menyusun Laporan Magang	<i>gdi</i>
Hari ke-24 (Kamis, 17-2-2022)	Menyusun Laporan Magang	<i>gdi</i>
Hari ke-25 (Jumat, 18-2-2022)	Menyusun Laporan Magang	<i>gdi</i>

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Dokumentasi Pelaksanaan Magang

Formulir Data

No	KEB	Kec	Standar (isi Kumpulan)	Di Baca	Di Sim	Referensi
1	Serep	Blahung	0	✓	✓	0
2	Wajar kitab	Pulung	0	✓	✓	✓
3	Kepah kitab	Suman	0	✓	✓	✓
4	Pokyo	Pancong	0	✓	✓	✓
5	Pragijen	Sukong	0	✓	✓	✓
6	Kawar Kide	Jambon	0	✓	✓	✓
7	Bletem	Jambon	0	✓	✓	0
8	Sendang	Jambon	0	✓	✓	0

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DI KABUPATEN PONOROGO

Kategori: KB
Buku
Kategori: KAL/KOR
Provinsi

No	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
1	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
2	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
3	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
4	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
5	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
6	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
7	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
8	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
9	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN
10	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN	WISATA/KEGIATAN

The image shows a computer workstation. The monitor displays a table with columns for 'No', 'Nama', 'Jumlah', 'Kategori', 'Status', and 'Keterangan'. Below the monitor, a browser window shows a document viewer for 'laporan magang'. The document page is titled 'BAB II METODE KEGIATAN MAGANG' and contains a table of contents with sections like '3.1 Tempat Magang', '3.2 Waktu Magang', and '3.3 Metode Pelaksanaan Magang'.

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Bella Dwi Saputri
 NIM : 101811133078
 TEMPAT MAGANG : Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Ponorogo

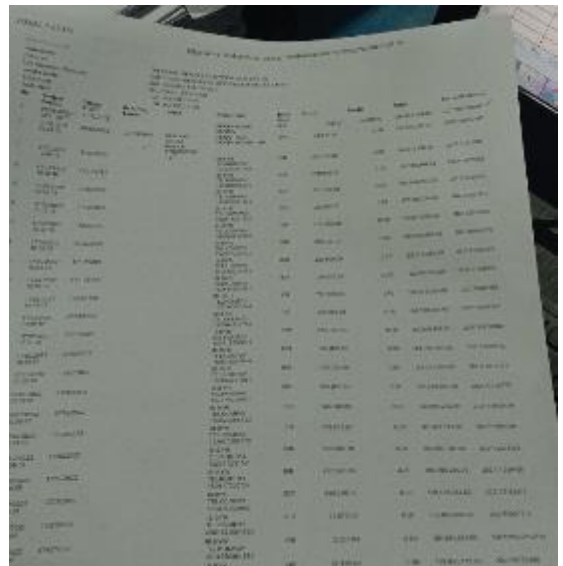
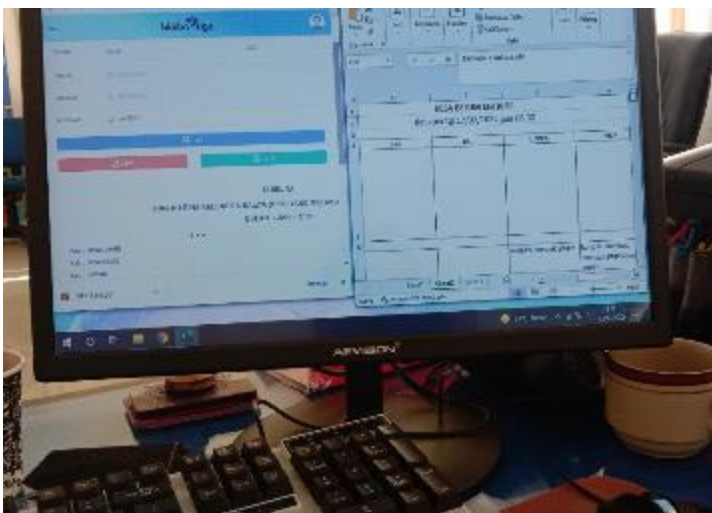
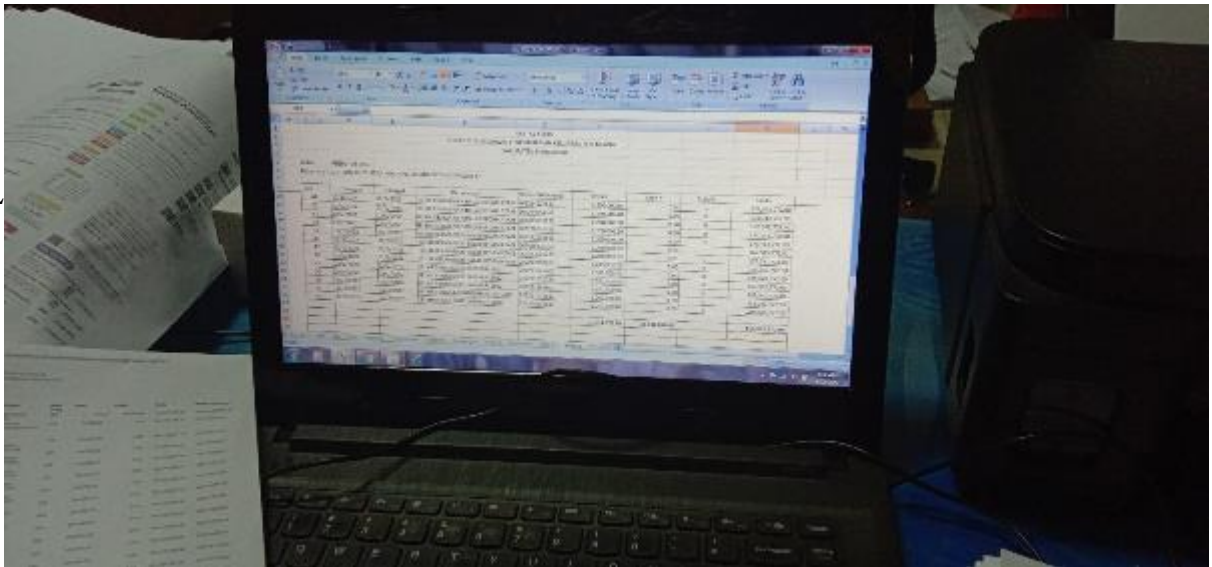
Minggu keenam		
Hari ke-26 (Senin, 21-2-2022)	Membantu persiapan rapat rutin PKB	<i>LD</i>
Hari ke-27 (Selasa, 22-2-2022)	menyusun laporan magang, monitoring input data K1 dan K2 new sig3	<i>LD</i>
Hari ke-28 (Rabu, 23-2-2022)	menyusun laporan magang, membantu perekapan transaksi di bidang keuangan	<i>LD</i>
Hari ke-29 (Kamis, 24-2-2022)	Menyusun laporan magang	<i>LD</i>
Hari ke-30 (Jumat, 25-2-2022)	Menyusun laporan magang	<i>LD</i>

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Dokumentasi Pelaksanaan Magang



Lampiran 2 Surat Pengantar Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 7318/UN3.1.10/PK/2021
Perihal : **Permohonan izin magang**

6 Desember 2021

Yth. Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
Gedung Terpadu Lantai 5 Jalan Basuki Rahmat Ponorogo

Schubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	Peminatan	Pembimbing	Pelaksanaan
1.	Bella Dwi Saputri	10181113378	Biostatistika & Kependudukan	Dr. Ariel Wibowo, dr., M.S	Offline

Sebagai peserta magang di **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo**, mulai **3 Januari - 11 Februari 2022**. Terlampir kami sampaikan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Dekan
Dekan I,

Anita Damayanti, drg., M.S.
96272281989112001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR
2. Kadept. EBIOP FKM UNAIR
3. Ketua Divisi Biostatistika & Informatika Kependudukan FKM UNAIR
4. Koordinator Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR
5. Koordinator Magang Departemen
6. Yang bersangkutan

Lampiran 3 Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 533/ 405.28 / 2021

Berdasarkan surat dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, tanggal 15 Desember 2021, Nomor: 800/3036/405.12/2021, Perihal Permohonan Ijin Magang.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Peneliti	: BELLA DWI SAPUTRI Mhs. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.
Alamat	: Jl. Niken Gandini RT/ RW. 00/001 Kel/Ds. Kadipaten Kec. Babadan Kab. Ponorogo
Thema/Acara Survey/Research/ PKU/Pengumpulan Data/Magang	: " Magang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo "
Daerah/Tempat dilakukan PKN/ Survey/Pengumpulan Data	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
Tujuan Penelitian	: Magang
Lamanya	: 03 Januari s/d 11 Februari 2022
Bidang Penelitian / Magang/PKL	: Kesehatan Masyarakat
Status Penelitian	: Baru
Nama Penanggung Jawab / Koordinator Penelitian	: <u>Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.</u> Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya
Anggota / Peserta	: -
Nama Lembaga	: Universitas Airlangga Surabaya.

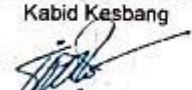
Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid 19 ;
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat;
3. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat;
4. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucian serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk;
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas;
6. Setelah berakhirnya dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL;
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada:
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo;
8. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 29 Desember 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PONOROGO
 Kabid Kesbang


Drs. TRIKARJANTO, MM

Pembina

NIP. 19640610 199710 1 001

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Kesehatan
 Masyarakat Universitas Airlangga
 Surabaya.

Lampiran 4 Tabel 15 mengenai Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI														JUMLAH PESERTA KB AKTIF
		IUD		MOW		MOP		KONDOM		IMPLAN		SUNTIKAN		PIL		
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	
350201	Slahung	2295	32,30%	375	5,28%	22	0,31%	136	1,91%	1152	16,21%	2581	36,33%	544	7,66%	7105
350202	Ngrayun	1349	19,45%	515	7,42%	69	0,99%	40	0,58%	265	3,82%	3679	53,03%	1020	14,70%	6937
350203	Bungkal	1850	38,81%	315	6,61%	19	0,40%	260	5,45%	821	17,22%	1188	24,92%	314	6,59%	4767
350204	Sambit	1535	25,69%	337	5,64%	3	0,05%	376	6,29%	766	12,82%	1896	31,74%	1061	17,76%	5974
350205	Sawoo	2466	33,08%	498	6,68%	20	0,27%	264	3,54%	813	10,91%	2729	36,61%	665	8,92%	7455
350206	Sooko	375	12,22%	172	5,61%	71	2,31%	58	1,89%	812	26,47%	1418	46,22%	162	5,28%	3068
350207	Pulung	1873	23,89%	660	8,42%	81	1,03%	282	3,60%	1492	19,03%	2903	37,02%	550	7,01%	7841
350208	Mlarak	998	26,56%	177	4,71%	7	0,19%	124	3,30%	403	10,72%	1803	47,98%	246	6,55%	3758
350209	Jetis	440	11,35%	286	7,37%	5	0,13%	179	4,62%	314	8,10%	1814	46,78%	840	21,66%	3878
350210	Siman	2988	49,54%	338	5,60%	19	0,31%	207	3,43%	580	9,62%	1543	25,58%	357	5,92%	6032
350211	Balong	1994	35,80%	143	2,57%	36	0,65%	93	1,67%	641	11,51%	2317	41,60%	346	6,21%	5570
350212	Kauman	1923	38,94%	317	6,42%	9	0,18%	178	3,60%	552	11,18%	1583	32,06%	376	7,61%	4938
350213	Badegan	649	16,51%	218	5,54%	6	0,15%	83	2,11%	708	18,01%	2028	51,58%	240	6,10%	3932
350214	Sampung	1454	30,65%	272	5,73%	3	0,06%	90	1,90%	384	8,09%	2161	45,55%	380	8,01%	4744
350215	Sukorejo	2022	29,82%	296	4,37%	10	0,15%	462	6,81%	961	14,17%	2382	35,13%	647	9,54%	6780
350216	Babadan	1854	30,08%	352	5,71%	8	0,13%	289	4,69%	258	4,19%	2846	46,18%	556	9,02%	6163
350217	Ponorogo	2148	45,00%	599	12,55%	10	0,21%	172	3,60%	247	5,17%	1297	27,17%	300	6,29%	4773
350218	Jenangan	812	11,17%	542	7,45%	13	0,18%	338	4,65%	632	8,69%	3362	46,24%	1572	21,62%	7271
350219	Ngebel	454	19,19%	146	6,17%	20	0,85%	121	5,11%	592	25,02%	585	24,73%	448	18,93%	2366
350220	Jambon	1032	16,76%	196	3,18%	39	0,63%	176	2,86%	958	15,56%	3262	52,98%	494	8,02%	6157
350221	Pudak	317	21,86%	109	7,52%	18	1,24%	0	0,00%	497	34,28%	434	29,93%	75	5,17%	1450
JUMLAH		30828	27,78%	6863	6,19%	488	0,44%	3928	3,54%	13848	12,48%	43811	39,48%	11193	10,09%	110959

Lampiran 5 Tabel 21 mengenai Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	PUS BUKAN PESERTA KB		PUS BUKAN PESERTA KB YANG							
					HAMIL		INGIN ANAK SEGERA		INGIN ANAK DITUNDA		TIDAK INGIN ANAK LAGI	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
350201	Slahung	10.484	3.379	32,23%	266	7,87%	2.068	61,20%	560	16,57%	485	14,35%
350202	Ngrayun	10.426	3.489	33,46%	349	10,00%	2.087	59,82%	531	15,22%	522	14,96%
350203	Bungkal	7.107	2.340	32,93%	179	7,65%	1.460	62,39%	313	13,38%	388	16,58%
350204	Sambit	8.860	2.886	32,57%	497	17,22%	1.258	43,59%	635	22,00%	496	17,19%
350205	Sawoo	11.245	3.790	33,70%	309	8,15%	2.204	58,15%	597	15,75%	680	17,94%
350206	Sooko	4.735	1.667	35,21%	135	8,10%	1.126	67,55%	250	15,00%	156	9,36%
350207	Pulung	11.451	3.610	31,53%	281	7,78%	2.244	62,16%	506	14,02%	579	16,04%
350208	Mlarak	5.579	1.821	32,64%	155	8,51%	1.147	62,99%	265	14,55%	254	13,95%
350209	Jetis	5.792	1.914	33,05%	181	9,46%	1.001	52,30%	373	19,49%	359	18,76%
350210	Siman	8.691	2.659	30,59%	200	7,52%	1.998	75,14%	217	8,16%	244	9,18%
350211	Balong	8.363	2.793	33,40%	348	12,46%	1.128	40,39%	468	16,76%	849	30,40%
350212	Kauman	7.515	2.577	34,29%	238	9,24%	927	35,97%	661	25,65%	751	29,14%
350213	Badegan	5.921	1.989	33,59%	145	7,29%	630	31,67%	582	29,26%	632	31,77%
350214	Sampung	7.085	2.341	33,04%	142	6,07%	1.594	68,09%	348	14,87%	257	10,98%
350215	Sukorejo	10.099	3.319	32,86%	352	10,61%	886	26,69%	994	29,95%	1.087	32,75%
350216	Babadan	10.797	4.634	42,92%	226	4,88%	3.516	75,87%	538	11,61%	354	7,64%
350217	Ponorogo	10.720	5.947	55,48%	522	8,78%	1.091	18,35%	788	13,25%	3.546	59,63%
350218	Jenangan	11.102	3.831	34,51%	369	9,63%	1.458	38,06%	878	22,92%	1.126	29,39%
350219	Ngebel	3.761	1.395	37,09%	125	8,96%	425	30,47%	437	31,33%	408	29,25%
350220	Jambon	9.113	2.956	32,44%	250	8,46%	1.197	40,49%	808	27,33%	701	23,71%
350221	Pudak	2.115	665	31,44%	59	8,87%	209	31,43%	76	11,43%	321	48,27%
JUMLAH		170.961	60.002	35,10%	5.328	8,88%	29.654	49,42%	10.825	18,04%	14.195	23,66%